SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 69 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 *Unaudited*;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK/05.2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

a. Menyusun jadwal kebutuhan sumber daya Penilaian;
b. Melaksanakan Persiapan Draft Pengendalian Intern di Unit Kerja;
c. Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut atas rekomendasi;
d. Memastikan Kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dari aplikasi;
e. Melakukan indentitas risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material; dan
f. Memantau perkembangan Tindakan perbaikan PIPK.

Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

a. Membuat Laporan Hasil Penilaian PIPK kepada Pimpinan Entisitas Akuntasi dan/atau Entitas Pelaporan dan tim penilai secara berjenjang;

b. Menyusun Laporan hasil Penilaian PIPK yang berisi penyimpulan efektivitas Penerapan PIPK;
c. Melakukan Perencanaan Penilaian Pengendalian Intern;
d. Melakukan Penilaian Pengendalian intern Tingkat entitas, antara lainnya :
   1. Akun Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah dan Kas lainnya di K/L dari Hibah belum disahkan;
   2. Akun TP/TGR Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti rugi dan Piutang Jangka Panjang Lainnya;
   3. Akun Pendapatan Perolehan Aset Lainnaya (Reward Bank).
e. Melakukan proses Penilaian Pengendalian intern tingkat/transaksi;
f. Melakukan Penilaian Pengendalian secara keseluruhan;
g. Melakukan kompilasi dan menarik Kesimpulan atas penilaian efektifivitas pengendalian intern UAPPA-W;
h. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
i. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya; dan
j. Menyusun laporan hasil penilaian PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.654500/2025 Revisi ke 5 tanggal 6 Agustus 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

MUHAMAD SAMSUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

FANDI AKHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 69 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. TIM PENYUSUN

No.	Nama	Jabatan Perbendaharaan
1.	Nurdiyawan, S.Sos.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logisitik
2.	Anita Rohmani, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan
3.	Chandra Topan Jaya, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik
4.	Helmi Mika Pasulu, A.Md.	Bendahara Pengeluaran
5.	Giska Yolanda, A.Md.	Operator SAKTI Modul GL dan Pelaporan; Operator SAKTI Modul Piutang
6.	Audy Valentiano, S.Kom.	Operator SAKTI Modul Komitmen
7.	Angraheni Niken Susanti, S.E.	Operator SAKTI Modul Pembayaran
8.	Novia Ningrum Permata, S.E.	Operator SAKTI Modul Pembayaran
9.	Awaliah Nur Annisa, S.S	Operator SAKTI Modul Pembayaran
10.	Sabaruddin	Operator Modul Persediaan
11.	Randy Julianto, S.E.	Staf Pelaksana

2. TIM PENILAI

No.	Nama	Jabatan Perbendaharaan
1.	Fandi Akhmad, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
2.	M. Zuhri, S.Kom.	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
3.	Anastasia Juwita Putri, S.H.	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Madya
4.	Anita Rohmani, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan
5.	Yulianita Adityarini, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
6.	Suliati, S.E.	Kepala Sub Bagian Hukum
7.	Bambang Daryatno, S.H	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
8.	Yunus, S.Stat.	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
9.	Ruhyati Dalima, A.Md.	Staf Pelaksana
10.	Rengga Utomo, S.IP.	Staf Pelaksana
11.	Jhon Ias Ganesa, S.H.	Staf Pelaksana
12.	Imawan Hasbullah	Staf Pelaksana
13.	Rahmat Sabaru	Staf Pelaksana

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

MUHAMAD SAMSUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

FANDI AKHMAD